

## DAFTAR PUSTAKA

- A, C. P. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kompas Gramedia.
- Al-Muluk, A. A.-M. (2020). Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 23 Atas Transaksi Sewa Dan Jasa Dalam Rangka Penghematan Pajak (Tax Saving) Perusahaan. Tangerang Selatan: Politeknik Keuanan Negara STAN.
- Anwar , M. C. (2022, Januari 7). *Kompas.com*. Diambil kembali dari Kompas Media: [https://money.kompas.com/read/2022/01/07/170852626/pahami-aturan-jam-kerja-lembur-dan-cara-menghitung-upah-lembur#:~:text=Aturan%20jam%20lembur%20karyawan%20Disebutkan%20dalam%20aturan%20tersebut%2C,pada%20waktu%20istirahat%20mingguan%20dan%20Fatau%20hari%](https://money.kompas.com/read/2022/01/07/170852626/pahami-aturan-jam-kerja-lembur-dan-cara-menghitung-upah-lembur#:~:text=Aturan%20jam%20lembur%20karyawan%20Disebutkan%20dalam%20aturan%20tersebut%2C,pada%20waktu%20istirahat%20mingguan%20dan%20Fatau%20hari%20)
- Aryanti, Y. D. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT X di Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3-9.
- Cahyadi, R. K. (2021, Januari 21). *Gadjian.com*. Diambil kembali dari <https://www.gadjian.com/blog/2021/01/21/cara-perhitungan-bpjs-ketenagakerjaan-di-aplikasi-gadjian/#:~:text=Cara%20perhitungan%20BPJS%20Ketenagakerjaan%20secara%20umum%20adalah%20dengan,upah%20karyawan%2C%20yaitu%20gaji%20pokok%20dan%20tunjangan%20tetap.>

- Dodi. (t.thn.). Penggajian dan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 PT XXX. (T. Andres, Pewawancara)
- Indonesia, M. T. (2004). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
- Indonesia, P. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Indonesia.
- Kalangi, F. (2014). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Hotel Sahid Kawanua Manado. *Jurnal EMBA*, 175-183.
- Keuangan, B. K. (2021, November 13). Diambil kembali dari Penggantian Biaya Pengobatan Terutang PPh 21 atau Tidak?: <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-penggantian-biaya-pengobatan-terutang-pph-21-atau-tidak-2019-11-05-0ef8d7a2/>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Muaja, R. J., & Tangkuman, S. (2015). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di PT Elsada Servo Cons. *Jurnal EMBA*, 82-91.
- Nabila, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT Z). *Jurnal Perpajakan*, 1-8.
- Nareswari, N. Y., & Sitinjak, N. D. (2019). Gross-Up Bermanfaat Dalam Tax Planning? *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 1-8.

- Nurwati, & Anwar, S. (2019). Penerapan Tax Planning atas Witholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT CAT. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 2-16.
- Pajak, D. J. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Indonesia: Direktur Jenderal Pajak.
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Suadi, E. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- W, T. D. (t.thn.). *Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan*.